

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024 yang terdapat mandat penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah, serta didukung adanya Renstra BPKP 2020-2024 yang memiliki target level SPIP dan MRI berada pada level di atas 3 untuk 78% K/L/D, namun belum didukung oleh adanya sistem penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang memadai, sehingga terbit Perban BPKP Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP menjadi sistem SPIP Terintegrasi, sekaligus mencabut masa berlakunya pedoman lama yaitu Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016. Oleh karena itu, terjadi perbedaan dalam evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun 2019 dengan tahun 2021 karena adanya perubahan pedoman tersebut.

Hasil skor tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah X tahun 2019, mengalami penurunan skor yang tidak terlalu signifikan karena penurunan kurang dari 0,50 yaitu hanya sebesar 0,11. Hasil skor QA yang dilakukan oleh tim reviu Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Pemda X tahun 2019 berada pada level 3 atau masuk dalam tingkat terdefinisi. Dalam level ini masih terdapat kelemahan

terkait tidak adanya dokumentasi yang memadai dalam proses evaluasi atas pelaksanaan praktik pengendalian intern.

Hasil skor tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah X tahun 2021, mengalami penurunan skor yang hampir signifikan karena penurunan hampir mencapai 0,50 yaitu sebesar 0,47. Hasil skor evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Pemda X tahun 2021 berada pada level 3 atau masuk dalam tingkat terdefinisi. Dalam level ini masih terdapat kelemahan terkait pelaksanaan struktur dan proses pengendalian yang belum efektif dan belum adaptif terhadap perubahan.

Perubahan pedoman penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dari Peraturan Kepala BPKP No 4 Tahun 2016 menjadi Perban BPKP No 5 Tahun 2021, mengakibatkan sistem penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan terciptanya sebuah sistem SPIP Terintegrasi yang mengintegrasikan penilaian SPIP dengan MRI, IEPK, dan Kapabilitas APIP serta dikaitkan langsung dengan 4 tujuan SPIP dan lebih berfokus dalam membantu menentukan *Area of Improvement* serta pemberian rekomendasi perbaikan proses manajemen untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan Pemerintah Daerah X, sehingga perubahan pedoman ini membawa tren yang positif terhadap efektivitas evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

Pada hasil perbandingan komponen struktur dan proses antara tahun 2019 dengan tahun 2021, menunjukkan terdapat 9 sub unsur yang memiliki penurunan capaian skor dan 6 di antaranya mengalami penurunan yang cukup signifikan

sebesar 1,00. Walaupun skor dalam komponen struktur dan proses tahun 2021 cenderung menurun dari tahun 2019, masih terdapat penilaian lain yang tidak ada di tahun 2019 yaitu penilaian komponen penetapan dan pencapaian tujuan serta penilaian MRI dan IEPK. Oleh karena itu, skor tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2019 hanya sebesar komponen struktur dan proses saja yaitu sebesar 3,16, tetapi skor tahun 2021 adalah akumulasi rata-rata tertimbang dari penilaian SPIP, MRI, dan IEPK yaitu sebesar 3,23. Sehingga terjadi peningkatan skor maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 0,07 atau sekitar 2,13% yang menunjukkan tren positif pada efektivitas evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah pada Pemerintah Daerah X pada tahun 2019 dan tahun 2021. Selain itu, masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan atas hasil rekomendasi dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Daerah X agar ditindaklanjuti terkait penyempurnaan/perbaikan kualitas perencanaan, penyempurnaan indikator kinerja dan target sasaran strategis Pemda/OPD/program/kegiatan/sub kegiatan, perumusan sasaran program dan sasaran kegiatan bagi seluruh OPD, dan penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan.